

Jurnal Penelitian **KEISLAMAMAN**

Terakreditasi: SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2008

Efektifitas 'Uqûbat dalam Qanun
No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
Danial

Dampak Sosial Kekerasan
terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok
dan Upaya Resolusi Konflik
Moh. Asyiq Amrulloh, dkk

Jihad dan Radikalisme dalam Perspektif
Pimpinan Pesantren di Jawa Barat
Nurrohman

Dinamisasi Tradisi Keagamaan
Kampung Jawa Tondano di Era Modern
Yusno Abdullah Otta

Pengarah

Asnawi (Rektor IAIN Mataram)

Ketua Penyunting

Ahmad Amir Aziz

Penyunting Pelaksana

L. Agus Satriawan

Saparudin

Anggota Penyunting

Kadri

Khairul Hamim

Masnun

Miftahul Huda

Muhammad Sa'i

Muhammad Tohri

Syarifuddin

Teti Indrawati Purnamasari

Tata Usaha

Rahmi

Syamsudin

Jurnal Penelitian Keislaman terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun, pada yaitu bulan Desember dan Juni. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2008 jurnal ini dinyatakan sebagai jurnal TERAKREDITASI dengan nilai B untuk masa tiga tahun (berlaku mulai bulan Juli 2008 s/d Juli 2011).

Penentuan artikel yang dimuat dalam **Jurnal Penelitian Keislaman** melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirimkan file makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau file dalam bentuk *attachment* dikirim via email.

Alamat Sekretariat:

Jurnal Penelitian Keislaman Lemlit IAIN Mataram

Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB phone (0370) 621298, fax 625337.

Email: penelitiankeislaman@yahoo.co.id

JIHAD DAN RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF PIMPINAN PESANTREN DI JAWA BARAT

Nurrohman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution No.105 Bandung
Email: nsyarif2006@yahoo.co.id

Abstrak: Secara historis, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pernah digunakan oleh kalangan tertentu menjadi basis perjuangan untuk mendirikan Negara Islam. Survey awal menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan. Diduga sejumlah pesantren di Jawa Barat masih mengembangkan paham keagamaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi dari penggunaan kekerasan serta sejalan dengan cita-cita politik kelompok Islam radikal. Data dalam penelitian ini diambil dari pandangan pimpinan pesantren di di Jawa Barat, khususnya di lima wilayah penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey dan interview. Survey dilakukan terhadap seluruh responden yang dijadikan sampel, sementara interview mendalam hanya ditujukan kepada sejumlah responden yang dipilih secara purposif. Dengan menganalisis jawaban responden atas sejumlah tema yang ditanyakan, penelitian ini membenarkan dugaan awal bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat masih mengembangkan paham keagamaan yang bisa dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap cita-cita politik kelompok fundamentalis radikal.

Kata kunci: jihad, Islam radikal, negara Islam, politik Islam, pesantren

JIHAD AND RADICALISM IN THE PERSPECTIVE OF THE PESANTREN LEADERS IN WEST JAVA

Nurrohman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution No.105 Bandung
Email: nsyarif2006@yahoo.co.id

Abstract: Historically, West Java constitutes one of the regions that used to be a base-camp for parties that strived for the establishment of an Islamic state. Previous surveys and research have revealed that some pesantrens in West Java could potentially become a center of religious radical movements that use violence as a means of achieving their goals. It is argued that some pesantrens in West Java still develop religious ideology that can be seen as a support of the use of violence that fits with the agenda of radical groups. The data in this study reflect the views of the pesantren leaders in five regions in West Java. The data were collected through interviews and surveys. The answers given by the informants in the interviews and survey reveal that some pesantrens still hold radical views, as the previous studies demonstrated. Most views of the pesantrens collected in the study confirm that their religious understandings are in line with those of the radicals.

Keywords: jihad, radical Islam, Islamic state, pesantren

PENDAHULUAN

Gerakan-gerakan Islam radikal selalu ada hubungannya dengan cara mereka memaknai jihad terutama dalam rangka melawan kemungkaran atau apa yang mereka anggap ketidakadilan. Gerakan Islam radikal juga selalu ada hubungannya dengan agenda politik praktis atau politik kekuasaan dalam pengertian merebut, mempertahankan atau menghancurkan kekuasaan yang dinilai akan menghalangi tercapainya agenda politik mereka. Dalam rangka merebut kekuasaan atau mendirikan Negara Islam mereka tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan dan tindakan kriminal.

Secara historis, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam.¹ Survey atau hasil penelitian awal menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan. Penelitian awal juga menunjukkan bahwa Jamaah Islamiyah (JI), kelompok Islam garis keras yang berusaha mendirikan khilafat di Asia Tenggara juga menjadikan pesantren sebagai salah satu basis penanaman ideologi politik mereka.

Laporan International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussels, tertanggal 3 Mei 2007 yang berjudul: *Jamaah Islamiyah's Current Status*, antara lain menyebutkan bahwa JI masih menyimpan cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kekuatan JI di berbagai wilayah di Indonesia akan ditentukan oleh berbagai factor seperti adanya pesantren yang berafiliasi dengan JI, sejarah pemberontakan Darul Islam di daerah itu, hubungan bisnis dan kekerabatan di antara anggotanya, keberhasilan mereka dalam merekrut kader-kader dari lingkungan kampus, serta proses rekrutment yang terjadi dari dalam penjara.²

Banyak factor yang bisa menjadikan seseorang menjadi radikal,³ seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi serta faktor-faktor lingkungan termasuk ideologi politik yang dikembangkan dilingkungannya. Tidak semua faktor itu akan diteliti, penelitian akan memfokuskan pada paham keagamaan yang tercermin dalam pandangan pimpinannya. Diduga sejumlah pesantren di Jawa Barat masih mengembangkan paham keagamaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi dari penggunaan kekerasan serta

¹ C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)* diterjemahkan, *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafitipers, 1987).

² Lihat *Indonesia: Jamaah Islamiyah's Current's Satus*, 3 Mei 2007, www.crisisgroup.org

³ Radikal yang dimaksud disini adalah suatu pemikiran, sikap atau

paham keagamaan yang sejalan dengan cita-cita politik kelompok Islam radikal.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi *The more Muslims give their support for certain Islamic teaching legitimizing the use of violence, the more violence will happen*. (Semakin banyak umat Islam yang memberikan legitimasi untuk menggunakan kekerasan, maka peluang terjadinya kekerasan akan semakin tinggi). Penelitian ini juga didasarkan pada asumsi semakin banyak umat Islam yang mendukung ideologi politik kelompok radikal maka masa depan ideologi Pancasila dan demokratisasi di Indonesia akan semakin suram. (*The more Muslims give support to political ideology of radical group, the future of Pancasila ideology and democracy in Indonesia are in danger*). Penelitian ini akan memfokuskan diri pada pemahaman keagamaan di pesantren yang bisa memicu atau berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan dengan cara meneliti pemahaman mereka tentang jihad, kekerasan dalam agama serta pandangan mereka seputar kekuasaan, negara Islam atau khilafah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari sumber datanya termasuk jenis penelitian gabungan antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik deskriptif analitis. Bila dilihat dari cara data itu dijelaskan dan dinilai maka termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari pendekatan atau disiplin ilmu yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan politik hukum atau Fiqh Siyasah. Pendekatan politik yang dimaksud disini adalah usaha memahami pandangan atau tindakan seseorang kemudian menghubungkannya dengan relasi kekuasaan. Adapun pendekatan hukum atau fiqh yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang berusaha memahami norma-norma hukum Islam yang berasal dari hubungan antara teks suci, konteks dan pandangan seseorang.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari pandangan pimpinan pesantren di di Jawa Barat, khususnya di lima wilayah penelitian. Pesanten di Jawa Barat menurut data dari EMIS berjumlah 6.930 buah yang tersebar di 25 kabupaten/kota. (sekarang menjadi 26 kabupaten/kota karena di Kabupaten Bandung telah berdiri Kabupaten Bandung Barat).⁴ Sementara jumlah pesantren yang ada di lima wilayah penelitian adalah 1459 buah dengan perincian sebagai berikut; Cirebon (kabupaten/kota) 397 buah, Indramayu 56 buah, Majalengka 323 buah, Kuningan 430 buah

⁴Sumber: Data Pondok Pesantren Jawa Barat Tahun 2007 Education Management Information System (EMIS) Jl. Jend. Sudirman No.644 Phone 022-6073621).

dan Ciamis termasuk daerah Pangandaran 353 buah. Tidak semua pesantren dijadikan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya mengambil 100⁵ pesantren sebagai responden yang diambil dari lima daerah penelitian, masing-masing sebanyak 20 puluh buah pesantren. Pilihan terhadap 20 buah pesantren diambil secara purposif dengan mempertimbangkan wilayah, tempat pesantren berada, jumlah santri yang menetap di pesantren itu serta jenis atau type pesantrennya. Pesantren yang dijadikan responden diusahakan tidak berasal dari wilayah kecamatan yang sama, memiliki santri yang cukup banyak serta meliputi tiga tipe yakni: tradisional, modern dan kombinasi. Tiga tipologi pesantren ini adalah tipologi yang digunakan oleh Departemen Agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey dan in-depth interview.⁶ Survey dilakukan terhadap seluruh responden yang dijadikan sampel sementara interview mendalam hanya ditujukan kepada sejumlah responden yang dipilih secara purposif. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memahami lebih jauh terhadap jawaban responden yang diberikan dalam angket. Sedangkan teknik analisa data dilakukan melalui dua cara. Pertama, data dianalisa dengan pendekatan sistem dan politik hukum yang berlaku di Indonesia. Cara kedua, data dianalisa lagi dengan pendekatan fiqh siyasah atau politik hukum Islam sebagaimana yang ditulis ulama klasik atau kontemporer. Kedua cara ini terkadang digunakan dua-duanya atau salah satunya. Analisa ini, lebih jauh dimaksudkan untuk mengetahui potensi radikalisme dan fundamentalisme di kalangan pesantren. Radikalisme yang dimaksud disini adalah pandangan ekstrim yang berpotensi mendorong menimbulkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Sedangkan fundamentalisme yang dimaksudkan di sini adalah pandangan yang berusaha menyatukan agama dan politik dan menolak segala bentuk pemisahan antara agama dan politik atau sekularisme.

Secara umum gambaran responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dari segi umur kebanyakan responden (54%) berkisar antara 31 hingga 50, 32% berusia diatas 51 tahun, sedang sisanya berusia dibawah 30 tahun. Dilihat berdasarkan jenis kelamin 98% responden laki-laki, sedang sisanya (2%) berjenis kelamin wanita. Dari segi afiliasi ormas, sebagian besar (81%) responden mengaku memiliki afiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU), sisanya Muhammadiyah (1%), PERSIS (1%), PUI (1%). Sedangkan selebihnya (16%) menyatakan netral.

⁵Mengingat ada empat angket yang dinyatakan rusak, maka yang benar-benar ditabulasi dari seratus responden hanya 96 buah.

⁶Penelitian ini memakan waktu sekitar empat bulan mulai bulan April

Sementara dari segi afiliasi parpol kebanyakan mereka mengaku netral atau tidak terikat pada partai tertentu, sisanya, 27 % responden mengaku berafiliasi dengan PKB, 8% memilih PPP, 2% memilih PKS, 2% memilih PAN, 2% memilih Golkar, dan 2% lagi memilih PBB. Dari segi pendidikan, responden yang mengaku tidak bersekolah sebanyak 3%, lulusan SD sebanyak 16 %, lulusan SLTP sebanyak 18 %, lulusan SLTA sebanyak 30%, yang berpendidikan S-1 sebanyak 23%, S-2 sebanyak 7% ,dan S-3 sebanyak 2%. Sedangkan dari segi penghasilan responden, 57% berpenghasilan di bawah satu juta, 19% berpenghasilan antara 1 juta hingga 2 juta, 9% berpenghasilan 2-3 juta, 5% berpenghasilan di atas 3 juta, dan sisanya mengaku berpenghasilan tidak tentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Seputar Jihad

Pimpinan pesantren pada umumnya tidak setuju bila jihad disamakan dengan perang. Meskipun mereka menyadari bahwa sebagian dari makna jihad itu adalah perang dalam pengertian fisik namun mereka pada umumnya berpandangan bahwa perang fisik tidak terlalu penting, *jihad akbar* atau perang melawan hawa nafsu lebih penting ketimbang perang fisik atau *jihad ashghar*. Hampir semua mereka (99%) menyetujui bahwa jihad yang diperlukan untuk masa kini adalah jihad melawan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan umat Islam. Akan tetapi pada saat mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah masih perlu umat Islam menyusun kekuatan senjata untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Jawaban mereka terbagi dua sebagian mereka memandang bahwa menyusun kekuatan senjata masih diperlukan (34%) sementara sebagian besar (60%) lainnya memandang tidak perlu.

Bagaimana tindakan bom bunuh diri? Meskipun pimpinan pesantren pada umumnya tidak setuju (74%) menggunakan bom bunuh diri untuk menghancurkan kepentingan Barat namun masih ada pimpinan pesantren yang menyetujui dan menganggap sebagai jihad bom bunuh diri untuk menghancurkan kepentingan Barat khususnya Amerika Serikat. Angkanya cukup tinggi yakni 16 %. Dukungan terhadap Osama bin Laden juga masih cukup tinggi di dunia pesantren. Sebanyak 39 % memandang Osama bin Laden pejuang atau Mujahid. Alasan utama mereka adalah karena Osama bin Laden telah berusaha memerangi terorisme negara yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak (3%), masih ada juga pimpinan pesantren yang secara tidak langsung memberi dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Amrozi dkk. Mereka setuju bahwa apa

yang dilakukan oleh Amrozi, Imam Samudra, Abu Dujana dan lain-lain adalah bentuk jihad yang diperlukan masa kini.

Di sini tampak adanya sikap ambivalen dikalangan pimpinan pesantren dalam menyikapi tindakan Osama bin Laden. Di satu sisi mereka menentang tindakan terorisme tapi di sisi lain mereka menganggap Osama bin Laden sebagai pejuang Islam. Sikap ambivalensi para pimpinan pesantren bisa dipahami karena banyak pimpinan Islam yang melihat adanya ketidakadilan global sebagai akibat semangat kapitalisme dan imperialisme yang sering dihubungkan dengan perilaku Amerika Serikat. Banyak kalangan yang menilai bahwa Amerika telah berbuat keliru pada saat menginvasi Irak.

Meskipun sama-sama sering disebut sebagai kelompok teroris dan sama-sama menggunakan agama untuk melakukan tindak kekerasan, respon pimpinan pesantren terhadap Osama bin Laden berbeda dengan respon mereka terhadap Amrozi dan kawan-kawan. Kecaman mereka terhadap Amrozi dan kawan-kawan lebih keras ketimbang terhadap Osama bin Laden. Pada saat dihadapkan pada pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Amrozi, Imam Samudra, Abu Dujana dan lain-lain adalah bentuk jihad yang diperlukan masa kini, 79% pimpinan pesantren tidak menyetujuinya. Hal ini tampaknya karena dampak yang ditimbulkan oleh kelompok Amrozi dkk lebih terasa di Indonesia. Lebih dari 200 orang yang tidak berdosa menjadi korban tindakan bom bunuh diri di Bali pada tahun 2002.

Bila dilihat dari sudut politik hukum Indonesia, apa yang dilakukan oleh kelompok Amrozi dan kawan-kawannya jelas merupakan tindakan teror yang diancam hukuman berat dalam undang-undang Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, apa yang dilakukan mereka tidak bisa disebut jihad. Memang benar, bahwa tatanan dunia dewasa ini masih belum bisa memuaskan semua pihak. Banyak pihak yang mengakui adanya ketidakadilan global. Akan tetapi pembunuhan secara acak atau *random killing* jelas tidak bisa dibenarkan dalam Islam.⁷

Masalah Kekerasan dalam Agama

Secara umum, korban kekerasan dalam agama bisa menimpa kelompok yang dinilai sesat, kaum lemah seperti wanita dan anak, serta kelompok non Muslim. Para pimpinan pesantren pada umumnya masih memiliki pandangan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap penggunaan kekerasan, terutama bila dihadapkan pada paham keagamaan yang dinilai

⁷ Nurrohman, "Authentic Jihad is about peace and coexistence", *The Jakarta Post*, 10 February 2007.

sesat atau perbuatan yang dinilai munkar. Pada saat MUI (Majlis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran yang sesat maka hampir semua pimpinan pesantren menyetujuinya. Sebanyak 91 % dari mereka mendukung fatwa ini dan 85% diantara mereka menyetujui agar aliran ini dibubarkan agar tidak berkembang di Indonesia.⁸

Potensi kekerasan menjadi tinggi pada saat aliran yang dinilai sesat oleh MUI tidak mau membubarkan diri. Sebab dukungan yang diberikan pimpinan pesantren untuk menutup dan membubarkan aliran ini secara paksa juga tinggi. Sebanyak 90 % pimpinan pesantren setuju terhadap tindakan penutupan atau pembubaran secara paksa terhadap aliran sesat yang sudah diberi penerangan atau dakwah tapi tidak mau merubah pendiriannya.

Menurut informasi yang penulis terima dari *mailing list* Islam Progresif yang kemudian dikonfirmasi oleh orang Ahmadiyah sendiri, di Jawa Barat, ada 35 masjid Ahmadiyah yang tidak bisa digunakan oleh jemaat Ahmadiyah sejak SKB (Surat Keputusan Bersama) dikeluarkan.⁹ Masjid-masjid itu ada yang dibakar, ditutup, disegel, maupun dirusak.¹⁰

Dialog antar umat beragama guna memelihara kerukunan dan keharmonisan sudah sering dikumandangkan dan sudah sering dilaksanakan. Akan tetapi kekerasan atau intoleransi dalam urusan keagamaan masih sering muncul di mana-mana. Data yang dilansir oleh Setara institut dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap agama justru meningkat. Kalau pada tahun 2007 hanya terjadi 135 kasus kekerasan maka pada tahun 2008 terjadi 265 kasus. Investigasi yang dilakukan oleh

⁸ Survey yang dilakukan pada tahun 2007 oleh Malindo Institut terhadap pemimpin pesantren yang ada di wilayah Cianjur, Garut dan Tasikmalaya menemukan bahwa 56,2% dari pimpinan pesantren di wilayah ini setuju terhadap pernyataan "mengusir dan menghancurkan jamaah Ahmadiyah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar".

⁹SKB ini dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Juni 2008. Lihat www.crisisgroup.org

¹⁰35 masjid itu adalah: Sukapura, Tasikmalaya: 1 Masjid, Indihiang, Tasikmalaya: 1 Masjid, Singaparna, Tasikmalaya: 1 Masjid, Cibatu, Garut: 1 Masjid, Samarang, Garut: 1 Masjid, Pangauban, Garut: 1 Masjid, Sukawening, Garut: 1 Masjid, Banjar Patroman, Banjar: 1 Masjid, Manislor, Kuningan: 8 Masjid, Sadasari, Majalengka: 1 Masjid, Ciaruteun, Bogor: 1 Masjid, Leuwisadeng, Bogor: 1 Masjid, Cibitung, Bogor: 1 Masjid, Kemang, Bogor: 1 Masjid, Cianjur Kota, Cianjur: 1 Masjid, Cipeuyeum, Cianjur: 1 Masjid, Cikalong Kulon, Cianjur: 1 Masjid, Ciandam, Cianjur: 1 Masjid, Ciparay, Cianjur: 1 Masjid, Neglasari, Cianjur: 1 Masjid, Cicakra, Cianjur: 1 Masjid, Panyairan, Cianjur: 1 Masjid, Talaga, Cianjur: 1 Masjid, Sindangkerta, Cianjur: 1 Masjid, Parakansalak, Sukabumi: 1 Masjid, Lebaksari, Sukabumi: 2 Masjid, Panjalu, Sukabumi: 1 Masjid. Sumber: *Mailing List Islam Progressive* yang diterima penulis pada tanggal 15 Agustus 2008.

Setara meliputi sejumlah daerah yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Jawa Barat tercatat sebagai propinsi yang tertinggi dalam kasus kekerasan agama dengan 73 kasus, diikuti oleh propinsi Sumatra Barat dan Jakarta masing-masing 56 dan 45 kasus. Sementara Wahid institut juga mencatat adanya peningkatan kekerasan terhadap agama. Kalau pada tahun 2007 tercatat ada 197 kasus maka pada tahun 2008 tercatat ada 232 kasus.¹¹

Persoalan yang muncul adalah karena penutupan atau pembubaran secara paksa terhadap kelompok lain bisa dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun al-Qur'an jelas menyatakan bahwa perbedaan dalam agama merupakan urusan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikannya nanti di akhirat,¹² tetapi sebagian besar pimpinan pesantren merasa tidak cukup bila hanya diselesaikan di akhirat. Banyak di antara mereka yang menginginkan adanya penyelesaian duniawi dengan cara 'meluruskan' atau membubarkan aliran tersebut secara paksa. Di sini persoalan yang muncul adalah karena keyakinan pada dasarnya tidak bisa dipaksakan untuk diikuti atau dipaksakan untuk ditinggalkan. Pemaksaan terhadap keyakinan akan mengakibatkan munculnya sesuatu yang berlawanan dengan agama yakni kemunafikan. Tambahan lagi, kebebasan agama atau keyakinan adalah suatu yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia.¹³ Menurut Ahmad Syafii Maarif, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah, meskipun ajaran Islam yang diperkenalkan oleh kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan *al-Qiyadah al-Islamiyah* menyimpang dari al-Qur'an, pemerintah tetap harus melindungi kelompok minoritas ini, "*Nobody has the right to damage people's physical assets*," katanya sebagaimana dikutip oleh harian *The Jakarta Post*.¹⁴

Adanya kenyataan bahwa hampir semua pimpinan pesantren (92%) setuju agar negara segera melarang aliran keagamaan

¹¹Adianto Simamora, "Religious intolerance getting worse, says report," *The Jakarta Post*, January 14, 2009.

¹²Qs. al-An'am: 59.

¹³Saidiman, "Wahid: A 'prophet' welcomed abroad", *The Jakarta Post*, November 28, 2008. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid, mantan presiden Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Saidiman pernah menyatakan : "As long as I live, I must defend the members of Ahmadiyah's right to live, based on the Constitution."

¹⁴Lihat *The Jakarta Post*, "Indonesians urged to return to Pancasila values",

yang dinilai sesat oleh MUI menunjukkan bahwa sebagian besar pimpinan pesantren menempatkan lembaga MUI (Majlis Ulama Indonesia) diatas negara terutama dalam menentukan aliran agama yang dinilai sesat.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pimpinan pesantren masih menganut paham fiqih siyasah yang dianut oleh sejumlah ulama klasik yang membebaskan pengawasan aliran keagamaan yang sesat kepada negara. Al-Mawardi, misalnya, menyebutkan bahwa tugas atau kewajiban imam ada sepuluh. Pertama, memelihara agama sesuai dengan prinsip pokoknya dan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh umat terdahulu. Jika terjadi penyimpangan, imam hendaknya segera meluruskannya dan mengambil tindakan sesuai dengan hak dan ketentuan yang ada agar agama tetap terpelihara dan umat tidak tergelincir.¹⁵ Sepuluh tugas imam sebagaimana disebutkan oleh al-Mawardi juga disebutkan oleh Abu Ya'la al-Hanbali.¹⁶ Pandangan semacam ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia. Indonesia sejak awal, melalui semboyan bineka tunggal ika, sebenarnya didesain untuk menjadi negara plural yang melindungi semua agama dan keyakinan.

Kekerasan tidak hanya dialami oleh kelompok yang dinilai memiliki keyakinan yang menyimpang, tapi juga dialami oleh kelompok yang memiliki cara beribadah yang berbeda dari mainstream. Para pimpinan pesantren pada umumnya berpandangan bahwa shalat yang benar adalah shalat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah termasuk dalam menggunakan bahasanya yakni bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian besar mereka tidak setuju terhadap pandangan dan praktek seseorang yang dalam shalatnya menggunakan dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Shalat dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia oleh sebagian besar pimpinan pesantren (91%) dipandang sebagai perbuatan yang sesat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pimpinan pesantren pada umumnya masih memandang shalat sebagai ritual murni (*ibadah mahdalah*) yang bahasa maupun tata caranya tidak boleh dimodifikasi. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa bahasa Arab masih dipandang sebagai bahasa agama atau bahasa yang sakral. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa para pimpinan pesantren di Jawa Barat masih banyak yang Syafi'iyah oriented yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa Arab dalam shalat. Penilaian sesat terhadap orang yang melakukan shalat dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia menunjukan bah-

¹⁵Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 15,16.

¹⁶Abû Ya'la al-Hanbali, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), 27-28.

wa pimpinan pesantren di Jawa Barat masih sulit keluar dari madzhab Syafii. Padahal kalau mengacu pada madzhab Hanafi, shalat dengan menggunakan bahasa lain selain Arab masih dimungkinkin.¹⁷ Cap sesat juga menunjukkan bahwa mereka kurang toleran terhadap adanya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid.

Kehadiran wanita sebagai pejabat publik, mulai dari kepala desa sampai dengan presiden atau perdana menteri, semakin bisa diterima oleh kalangan Islam akan tetapi kehadiran wanita sebagai imam dalam shalat, dimana diantara para makmum terdapat kaum laki-laki, masih sulit diterima oleh sejumlah pemimpin agama dalam Islam. Potensi munculnya kekerasan juga tinggi bila di Indonesia ada wanita yang bertindak sebagai imam dalam shalat dimana sebagian makmumnya adalah laki-laki. Sebab sebagian besar pimpinan pesantren (86%) yang disurvei memandang sesat terhadap pendapat yang membolehkan seorang wanita menjadi imam shalat dimana diantara makmumnya adalah laki-laki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa para pemimpin pesantren pada umumnya belum bisa menerima persoalan ini sebagai persoalan *khilafiyah* yang biasa terjadi di kalangan fuqaha. Sebagian besar mereka masih memandang persoalan ini sebagai bentuk penyimpangan yang harus diberantas. Padahal kepemimpinan wanita dalam shalat sudah dipraktekkan oleh profesor Amina Wadud di Amerika Serikat. Amina Wadud sebenarnya juga layak dikategorikan sebagai mujtahid yang mesti dihargai hasil ijtihadnya. Memang ada hadits yang tidak membolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki tapi ada hadits lain yang menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi imam shalat bagi laki-laki. Dan menurut hasil penelitian ahli hadits, hadits yang terakhir justru yang lebih kuat.¹⁸ Potensi kekerasan di sini cukup tinggi karena ada 39 % pimpinan pesantren menyetujui tindakan penyerangan atau penghancuran terhadap aliran yang dinilai sesat ini.

Dalam masyarakat yang bersifat patriarkis seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dianggap biasa atau wajar. Tetapi dalam

¹⁷Berkenaan dengan ucapan takbiratul ihram (*Allahu akbar*), misalnya, madzhab Hanafiyah tidak mensyaratkan *mushalli* menggunakan bahasa Arab, meskipun ia mampu. Takbiratul ihram bisa diucapkan dengan bahasa apapun yang dikehendaki oleh *mushalli* (orang yang shalat). Meskipun demikian bagi mereka yang bahasa arabnya baik dianjurkan menggunakan bahasa arab dan makruh menggunakan bahasa lainnya. Adapun madzhab lainnya (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) pada umumnya memberi toleransi bagi mereka yang tidak mampu menggunakan bahasa arab. Lihat, Abd al-Rahman al-Jaziry *Kitābu al-fiqh 'ala al-madzāhib al-arba'ah, Qismu al-Ibādah*. (Kairo: Mathba'ah Dār al-Mishriyah, 1939), 155.

¹⁸Trisha Sertori, "Dr Amina Wadud For a Progressive Islam", *The Jakarta Post*, November 19, 2009.

masyarakat yang semakin menjunjung tinggi kesetaraan atau egalitarianisme seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena itu wajar bila dalam suasana dimana tuntutan kesetaraan jender semakin tinggi muncul pandangan yang mengharamkan poligami. Tetapi didunia pesantren pandangan semacam ini masih mendapat tantangan yang cukup luas. Sebagian besar mereka (86%) menolak pandangan yang mengharamkan poligami. Pandangan yang mengharamkan poligami menurut mereka adalah pandangan yang tidak benar (sesat). Padahal Muhammad Abduh dalam tafsirnya mengatakan dengan tegas poligami haram qat'i karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.¹⁹

Hal yang sama juga terjadi dalam pernikahan beda agama. Dalam ajaran al-Qur'an seorang lelaki muslim dimungkinkan menikahi wanita non Muslim yang ahli kitab. Akan tetapi bila dibalik yakni wanita muslimah nikah dengan lelaki non-Muslim, sebagian besar pimpinan agama tidak bisa menerimanya. Sebagian besar pimpinan pesantren (94%) berpendapat bahwa perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki non muslim tidak bisa dibenarkan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif khususnya terhadap wanita memang nyata adanya dalam pandangan agama, sementara lelaki muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim (ahli kitab), wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non-Muslim. Sayangnya pandangan diskriminatif ini sering dipandang sebagai pandangan yang final, tidak bisa berubah.

Potensi munculnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh ajaran agama masih tinggi. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sudah dimasukkan ke dalam tindakan kriminal dalam sistem hukum di Indonesia. Tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari tingginya persetujuan pimpinan pesantren terhadap ajaran Islam membolehkan seorang suami memukul isterinya yang *nusyuz* (tidak taat suami), memukul anak yang tidak mau shalat, serta mengkhitan perempuan. Sebanyak 73% pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa ajaran Islam membolehkan seorang suami memukul isterinya yang *nusyuz* (tidak taat suami), sebagian besar mereka (79%) menyetujui bahwa mengkhitan (memotong klitoris) wanita merupakan ajaran

¹⁹Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), jilid IV, 347-350. Pernyataan Abduh kembali ditegaskan dalam fatwanya tentang hukum poligami yang dimuat di majalah *al-Manâr* edisi 3 Maret 1927/29 Sya'ban 1345, Juz I, jilid XXVIII, yaitu poligami hukumnya haram. Adapun Qs. 4: 3 bukan menganjurkan poligami, tetapi justru sebaliknya harus dihindari (*wa laysa fî dzâlika targhib fî al-ta'did bal fîhi tabghid lahu*).

yang dianjurkan dalam Islam, dan hampir semua mereka (93 %) menyetujui tindakan orang tua untuk memukul anaknya yang tidak mau melaksanakan shalat. Menurut mereka ajaran Islam memang membolehkan orang tua memukul anaknya yang sudah berusia 10 tahun yang tidak mau melaksanakan shalat.

Potensi kekerasan terhadap non-Muslim bisa muncul dari kenyataan bahwa masih banyak pimpinan pesantren (33%) yang berpandangan bahwa umat Islam pada dasarnya tidak mungkin menjalin perdamaian abadi dengan umat non muslim atau kafir. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi konflik antara muslim dan non Muslim masih tinggi. Temuan ini juga mengandung makna bahwa masih banyak pimpinan umat Islam yang memiliki pandangan eksklusif. Hal ini juga menunjukkan bahwa rasa persaudaraan antar sesama bangsa tanpa memandang perbedaan agama masih belum bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Di sini tampaknya ada problem teologis yang mesti diselesaikan terlebih dahulu oleh mereka. Problem teologis sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara menyebutkan bahwa sejumlah pimpinan pesantren memiliki keyakinan bahwa non-Muslim khususnya Yahudi dan Nasrani selamanya akan merongrong umat Islam. Mereka akan terus merongrong umat Islam sampai umat Islam mau mengikuti agama mereka. Ayat al-Qur'an yang berbunyi *wa lan tardla anka al-yahudu wala al nashara hatta tattabia millatahum*²⁰ sering dirujuk sebagai landasannya. Mereka meyakini itu tanpa menghubungkannya dengan konteks historis dan sosiologis.

Kekerasan terhadap non-Muslim, terutama kaum Kristiani juga bisa terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Banyak pimpinan pesantren (75%) yang setuju bahwa gereja atau tempat beribadah orang Kristen/Khatolik yang dibangun tanpa izin harus dihancurkan atau ditutup. Di beberapa daerah kasus penutupan secara paksa terhadap beberapa gereja memang terjadi. Andaikata peristiwa itu terus berulang tanpa ada jalan keluar yang memuaskan maka negara bisa dianggap gagal dalam melindungi warganya yang mau menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Di mata internasional citra Indonesia sebagai negara yang pluralis dan toleran jadi tercoreng.

Temuan ini juga menarik, sebab temuan ini bisa menjelaskan mengapa di sejumlah daerah di Jawa Barat sering terjadi tindakan penutupan/penghancuran gereja secara paksa terhadap gereja yang dibangun tanpa izin resmi dari pemerintah. Salah satu penjelasannya adalah karena tindakan mereka ternyata mendapat

²⁰Qs. Al-Baqarah: 120.

dukungan dari sebagian besar pimpinan pesantren (75 %).²¹

Potensi konflik atau kekerasan yang dialami jamaah gereja tampaknya tidak mudah diakhiri karena masih banyak pimpinan pesantren (86%) yang setuju agar umat Islam menolak permohonan izin membangun gereja di wilayah mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa resistensi umat Islam, khususnya pimpinan pesantren terhadap kehadiran gereja di wilayah mereka cukup tinggi. Resistensi ini diperkuat dengan sikap sebagian besar pimpinan pesantren (81%) yang tidak membolehkan umat Islam mengucapkan selamat natal dan menghadiri undangan perayaan natal yang diselenggarakan oleh umat Kristiani. Temuan ini juga memperkuat dugaan bahwa umat Islam, khususnya para pimpinannya, menghadapi problem teologis yang serius dalam berinteraksi dengan non-Muslim, khususnya umat Kristiani.

Kekerasan juga bisa menimpa orang Islam yang dinilai telah keluar dari agamanya alias murtad. Banyak pimpinan pesantren (44%) yang masih mempertahankan pendapat lama yang membolehkan orang murtad untuk dihukum mati. Hasil wawancara juga memperkuat adanya pandangan semacam ini. Seorang pengajar di sebuah pesantren di Cirebon, misalnya mengatakan bahwa orang yang murtad dapat dikategorikan sebagai pengkhianat agama (munafik). "Untuk saat sekarang, pelaku murtad dari Islam boleh jadi menjadi musuh dan layak dihukum mati ", kata seorang nara sumber dalam sebuah wawancara.²² Padahal pendapat ini sudah banyak yang menyangkal karena tidak sejalan dengan semangat yang diajarkan oleh al-Qur'an. Tampaknya banyak pimpinan pesantren memandang bahwa kebebasan untuk pindah agama hanya berlaku bagi non Muslim kedalam Islam, sementara dari Muslim menjadi non-Muslim harus dilarang atau dicegah dengan berbagai cara. Prof.Dr.Baihaqi AK, misalnya, tidak setuju dengan pandangan yang menyatakan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh hak asasi manusia, dan karenanya orang bebas untuk masuk dan keluar dari agama tertentu. Menurutnya, dalam Islam memang orang tidak boleh dipaksa untuk masuk, mereka boleh masuk atau tetap berada di luar Islam tapi kalau dia sudah masuk dalam Islam dia mesti mau terikat dengan norma-norma hukum Islam.²³

Kekerasan juga bisa menimpa mereka yang dinilai menghina agama Islam. Umat Islam pada umumnya masih sensitif ter-

²¹Dukungan pimpinan pesantren di tiga wilayah yakni Tasikmalaya, Garut dan Cianjur, berdasarkan survey tahun 2007 malah lebih besar yakni 84.7%.

²²Imron Rosyadi, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 20 Juni 2008 di Wiyong Susukan Cirebon.

²³Nurrohmah, *Syari'at Islam, Konstitusi dan HAM* (Bandung, Pustaka al-K

hadap ucapan atau ekspresi orang yang bisa dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam. Persoalannya apa yang dimaksud penghinaan oleh pihak yang merasa dihina berbeda maknanya dengan pemahaman dari mereka yang dituduh menghina. Sering kali mereka yang dituduh menghina sebenarnya hanya mengemukakan pandangan atau ekspresinya tanpa bermaksud menghina. Makna lain dari hasil survey ini adalah bahwa agama memang berpotensi menjadi sumber kekerasan sehingga menimbulkan kekerasan atas nama agama. Makna lain dari temuan ini adalah bahwa *clash of civilization*, atau perang peradaban dalam kadar tertentu telah terjadi. Potensi munculnya kekerasan tampak bila dilihat dari tingginya persetujuan pimpinan pesantren untuk menghukum mati pembuat kartun yang menghina nabi Muhammad. Sebanyak 59 % pimpinan pesantren setuju bahwa orang-orang yang menghina Islam atau alquran seperti Kurt Westergaard (warga Denmark yang membuat kartun yang menghina Nabi Muhammad) dan Geert Wilders (Warga Belanda yang membuat film fitnah) boleh dibunuh. Westergaard sendiri dalam membuat kartun, sebenarnya tidak bermaksud menghina Islam. Dia sama sekali tidak memiliki problem dengan umat Islam. Target dia adalah terorist yang menggunakan interpretasi Islam untuk melegitimasi kekerasan. Westergaard menyatakan bahwa gambar yang dibuatnya *"not designed to offend Muslims but instead aimed at those who use religion to justify violence"*. Selanjutnya dia menambahkan : *" I have no problems with Muslims. I made a cartoon which was aimed at the terrorists who use an interpretation of Islam as their spiritual dynamite"*.²⁴

Pimpinan pesantren pada umumnya masih sensitif terhadap sikap, perbuatan atau ucapan yang dinilai bisa menodai agama. Terbukti bahwa 92 % dari mereka menyetujui agar aturan yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang menghina atau menodai agama (pasal 156a KUHP) tetap dipertahankan. Problemnya adalah bagaimana mensinkronkan agar aturan yang bisa digunakan untuk mem-pidanakan orang yang menghina agama tidak disalahgunakan untuk memberangus kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Selain itu problem lain yang sering muncul adalah bagaimana agar, pada saat terjadi kasus yang diduga ada penghinaan terhadap agama, mereka yang merasa agamanya dihina tidak bertindak main hakim sendiri.

Kekerasan juga bisa menimpa mereka yang berada di tempat maksiat seperti pelacuran dan perjudian. Tidak semua

²⁴Kim McLaughlin, "Danis Prophet cartoonist says has no regrets", *The Jakarta Post*, March 20, 2008.

perbuatan maksiat yang dilarang agama juga dilarang oleh undang-undang negara. Dan walaupun ada suatu perbuatan maksiat yang juga dilarang oleh undang-undang negara maka umat Islam tidak boleh main hakim sendiri. Aparat negaralah yang harus menindaknya. Akan tetapi, banyak pimpinan pesantren setuju (56%) terhadap tindakan FPI dan lain-lain yang main hakim sendiri dengan menyerang tempat-tempat pelacuran atau perjudian.

Potensi kekerasan juga bisa menimpa mereka yang terlibat dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebanyak 53% dari responden setuju bahwa Jaringan Islam Liberal (JIL) adalah aliran Islam yang sesat. Temuan ini menarik karena sebagian besar responden dalam survey ini (81%) adalah pesantren yang berafiliasi dengan NU sementara aktifis JIL pada umumnya adalah anak muda NU. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa meskipun NU, melalui pucuk pimpinannya sering mengklaim dirinya sebagai kelompok moderat, toleran dan menghargai tradisi perbedaan pendapat, dalam kenyataannya masih banyak orang NU sendiri yang belum siap menerima perbedaan pendapat.

Tentang Politik Kekuasaan dan Kenegaraan

Jargon politik Islam semacam *al-Islâm dîn wa dawlah* tampaknya cukup populer di kalangan umat Islam. Jargon ini sering kali mencari legitimasinya dari pengalaman historis bahwa nabi Muhammad saw disamping sebagai rasul juga sebagai kepala negara. Kenyataan bahwa Nabi pernah menjadi semacam kepala negara disepakati hampir oleh seluruh pakar Islam. Oleh karena itu wajar bila sebagian besar pimpinan pesantren di Jawa Barat juga setuju (96 %) terhadap pernyataan bahwa Muhammad saw disamping sebagai nabi juga sebagai kepala negara.

Doktrin bahwa Islam agama dan negara berimplikasi terhadap sikap maupun pandangan-pandangan yang muncul di dunia Islam. Banyak pimpinan pesantren yang berpendapat bahwa umat Islam harus ikut dalam perjuangan politik merebut kekuasaan. Dukungan pimpinan pesantren terhadap umat Islam agar terlibat dalam perjuangan politik merebut kekuasaan atau dalam kegiatan politik praktis cukup tinggi. Terbukti bahwa 78% dari mereka setuju bila umat Islam ikut dalam perjuangan politik merebut kekuasaan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah kalau faktanya memang Muhammad saw pernah menjadi kepala negara, apakah posisi atau kedudukan politik ini merupakan bagian dari misi risalanya? Para pimpinan agama atau pimpinan pesantren terkadang lupa bahwa misi utama yang dibawa oleh Rasulullah adalah menyempurnakan moralitas umat manusia, bukan misi politik untuk

merebut kekuasaan. Bila menyempurnakan moralitas umat manusia menjadi tujuan utama agama Islam maka perjuangan politik hanya merupakan salah satu alat saja, politik bukan satu-satunya dan juga bukan alat utama.

Implikasi lain dari cara pandang Islam *din wa dawlah* adanya keinginan untuk membuat kekuatan politik di tingkat global dengan menghidupkan kembali sistem khilafah. Romantisme pimpinan pesantren yang memimpikan adanya kesatuan kepemimpinan politik umat Islam di tingkat dunia dengan menghidupkan sistem khilafah cukup tinggi. Sebanyak 78% mereka setuju untuk membangun kepemimpinan politik di tingkat dunia dengan cara menghidupkan sistem khilafah. Pertanyaannya bagaimana bentuk sistem khalifah yang akan dibangun apakah akan menganut sistem teokrasi atau sistem demokrasi. Dimana pusat kekuasaan sistem khalifah ini, bagaimana posisi atau nasib negara bangsa (*nation state*) yang selama ini dianut oleh semua negara muslim. Tingginya dukungan mereka terhadap sistem khilafah secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa mereka tidak sepenuh hati dalam mendukung negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain negara Pancasila hanya diperlakukan sebagai tujuan antara, sebelum umat Islam mampu mendirikan kepemimpinan politik di tingkat dunia dengan menghidupkan sistem khilafah.

Oleh karena itu wajar bila gerakan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam masih terus hidup. Gerakan semacam ini secara tidak langsung mendapat dukungan dari sebagian pimpinan pesantren. Sebab meskipun sebagian besar pimpinan pesantren (53%) menyatakan setuju bahwa gerakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara Islam tidak diperlukan lagi, namun masih tinggi juga pimpinan pesantren yang tidak setuju (38%) terhadap pernyataan ini. Ketidaksetujuan mereka bisa dimaknai bahwa mereka secara tidak langsung setuju terhadap gerakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara Islam.

Bagi mereka yang membuat rumusan negara Islam sebagai negara yang menjamin terlaksananya syari'at Islam, formalisasi syari'at Islam menjadi penting. Masih banyak umat Islam yang merindukan kembalinya Piagam Jakarta karena di situ terdapat jaminan pelaksanaan syari'at Islam secara formal oleh negara. Banyak pula pimpinan pesantren yang mendorong agar umat Islam perlu terus menerus memperjuangkan Piagam Jakarta agar dimasukkan dalam UUD Indonesia. Sebagian besar pimpinan pesantren (58%) menyatakan setuju bahwa umat Islam perlu terus-menerus memperjuangkan Piagam Jakarta agar dimasukkan

Temuan ini menunjukkan bahwa pimpinan pesantren pada umumnya (58%) masih mengharapkan dukungan negara dalam melaksanakan syari'at Islam. Sebab perbedaan paling mendasar antara Pancasila yang ada dalam UUD sekarang dengan Piagam Jakarta adalah adanya kalimat: dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Dengan Piagam Jakarta, negara diharapkan bisa memaksakan syari'at Islam terhadap umat Islam.

Oleh karena itu apresiasi pimpinan pesantren terhadap peraturan daerah yang bernuansa syari'at sangat tinggi. Sebanyak 89 % pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa beberapa peraturan daerah yang bernuansa syari'at atau yang sering dikenal sebagai Perda Syari'at harus mendapat dukungan dari seluruh umat Islam. Tingginya dukungan terhadap Piagam Jakarta sinkron dengan dukungan yang tinggi terhadap Perda Syari'at. Pimpinan pesantren yang mendukung Perda Syari'at bahkan lebih tinggi dibanding mereka yang mendukung Piagam Jakarta. Bila terhadap Piagam Jakarta, dukungan mereka hanya sekitar 58 %, dukungan mereka terhadap Perda Syari'at mencapai 89 %. Tingginya dukungan mereka terhadap Perda Syari'at karena mereka menilai bahwa Perda itu bisa memperbaiki moral bangsa dan secara tidak langsung bisa mendekatkan Indonesia menjadi negara Islam.

Pertanyaan yang sering menggelitik yang ditujukan kepada umat Islam adalah apakah umat Islam benar-benar bisa menerima Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik mereka. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar dari pimpinan pesantren (65%) menyatakan setuju bahwa bagi umat Islam di Indonesia, Negara Pancasila bisa diterima sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam.

Temuan ini menarik bukan karena tingginya pimpinan pesantren (65%) yang menerima Negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam, hal ini tidak aneh karena pesantren mayoritas berafiliasi kepada NU dan NU sudah menyatakan bahwa Negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam, tapi yang aneh justru masih banyaknya pimpinan pesantren (27%) yang belum bisa menerima Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam. Sementara dukungan pesantren terhadap NKRI tidak perlu diragukan karena sebanyak 92 % pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa Umat Islam di Indonesia wajib mendukung dan membela tegaknya NKRI dengan segala cara.

Temuan ini menarik karena meskipun dalam hal menjadikan Pancasila sebagai ideologi final mereka tepecah pendapatnya, dalam hal dukungannya terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mereka hampir sepakat. Sebagian besar mereka mengajukan alasan bahwa NKRI sudah menjadi harga

mati. Ini maknanya bahwa umat Islam siap berjuang dan siap dimobilisasi untuk mencegah munculnya gangguan terhadap NKRI. Hal ini juga berarti bahwa gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI akan berhadapan dengan umat Islam.

Terkait peluang wanita dalam politik kekuasaan, umat Islam masih banyak yang menganggap wanita tidak layak tampil menurusi urusan publik seperti menjadi kepala negara. Pandangan seperti ini juga masih banyak dianut oleh pimpinan pesantren. Sebanyak 43% pimpinan pesantren menyatakan tidak setuju bahwa wanita menjadi kepala negara. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender masih cukup banyak. Sungguhpun demikian, pandangan yang menentangnya juga seimbang (44%).

Pimpinan pesantren juga banyak yang masih keberatan terhadap tampilnya non-Muslim sebagai kepala negara. Sebanyak 77 % pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa kemungkinan non Muslim menjadi kepala Negara di Indonesia harus dicegah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam undang-undang tidak ada larangan bagi non Muslim untuk menjadi kepala negara namun secara sosiologis maupun teologis hal itu masih sulit diterima mengingat sebagian besar pimpinan pesantren menolaknya. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian pimpinan pesantren masih belum bisa melihat non-Muslim sebagai saudara mereka sesama bangsa yang dilihat dari sudut kewarga negaraan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain termasuk hak untuk menjadi kepala negara.

Idealnya sebuah negara kebangsaan bisa memperlakukan semua warga negara secara setara sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan agama ras atau asal usul. Sebagian warga negara tidak boleh diistimewakan melebihi yang lain berdasarkan agamanya atau berdasarkan asal usulnya. Akan tetapi kenyataannya masih banyak umat Islam , karena merasa mayoritas di negeri ini ingin diperlakukan secara khusus atau istimewa. Masih banyak pimpinan pesantren yang ingin melihat umat Islam mendapat perlakuan khusus dari negara sementara non-Muslim diperlakukan sebagai *dzimmi*. Sebanyak 77% pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa sebagai kelompok mayoritas, umat Islam di Indonesia pantas mendapat perlakuan khusus dari negara. Sementara 71% pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa Non muslim di Indonesia harus diperlakukan sebagai kafir *dzimmi* (orang kafir dalam perlindungan negara Islam) yang hak-haknya tidak sama dengan muslim. Kafir *dzimmi* dalam fiqih jelas diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Temuan ini menarik karena pimpinan pesantren yang setuju memperlakukan non-Muslim sebagai kafir *dzimmi* cukup tinggi (71%). Padahal Indonesia bukan negara Islam sementara *dzimmi* dalam konsep negara Islam diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Inilah sebabnya gagasan negara Islam sering membuat takut non-Muslim karena akan membuat mereka turun kelas dan diperlakukan secara diskriminatif. Ancaman yang paling serius adalah terjadinya disintegrasi bangsa.

Masih banyak umat Islam yang memandang bahwa persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islâmiyah*) lebih penting ketimbang persaudaraan sebangsa (*ukhuwah wathaniyah*). Sebanyak 90% pimpinan pesantren menyatakan setuju bahwa persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islâmiyyah*) lebih penting ketimbang persaudaraan sebangsa (*ukhuwwah wathaniyah*). Ini artinya para pemimpin pesantren pada umumnya lebih memilih identitas keislaman ketimbang identitas keindonesiaan.

Salah satu perkembangan positif dari era reformasi ini adalah bahwa umat Islam pada umumnya bisa menerima gagasan atau paham demokrasi meskipun harus diakui demokrasi yang berjalan di Indonesia dewasa ini masih lebih menekankan pada demokrasi prosedural ketimbang substansinya. Sebanyak 79 % pesantren pimpinan pesantren setuju bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam.

Temuan ini menunjukkan adanya indikasi positif dari kalangan pesantren dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia sebab sebagian besar mereka setuju bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Alasan yang diajukan mereka pada umumnya karena demokrasi sejalan dengan konsep *syuro* dalam Islam. Perhatian terutama diarahkan pada mereka yang tidak setuju, jumlah mereka cukup signifikan 14 %, sebab mereka tentu akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri kedalam kehidupan yang lebih demokratis.

SIMPULAN

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa para pimpinan pesantren di lima wilayah yang diteliti pada umumnya berpandangan bahwa jihad merupakan ajaran Islam yang penting dan mulia. Jihad tidak identik dengan perang dan tindakan terorisme. Mereka pada umumnya mengecam aksi terror yang berlandung dibawah bendera jihad. Meskipun mereka mengakui ada makna jihad yang berarti perang tapi jihad dalam arti perang termasuk jihad kecil. Jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad besar yang paling diperlukan umat Islam dewasa ini

adalah jihad melawan kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan. Sungguhpun demikian masih ada sebagian kecil mereka yang mendukung aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam dengan mengatasnamakan jihad. Mereka juga berpandangan bahwa penyimpangan atau kesesatan mesti diluruskan, kemungkaran yang terjadi di masyarakat harus dicegah sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Meskipun demikian mereka berbeda dalam menyikapi tindak kekerasan yang membawa simbol agama. Banyak pimpinan pesantren yang masih mendukung atau mentolerir tindakan kekerasan semacam ini sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan di masyarakat.

Para pimpinan pesantren tersebut pada umumnya juga berpandangan bahwa Islam itu meliputi agama dan Negara. Pandangan semacam ini biasanya dibarengi dengan pandangan lain sebagai konsekwensinya. Misalnya, mereka pada umumnya menolak Negara sekuler, dan belum sepenuhnya bisa menerima Pancasila sebagai ideologi final, mereka juga belum sepenuhnya bisa menganggap non-Muslim sebagai sesama warga Negara yang sama hak dan kewajibannya. Selain itu, disamping ditemukan beberapa pimpinan pesantren yang masih mendukung pandangan yang bersifat diskriminatif, juga ditemukan pimpinan pesantren yang secara tidak langsung masih mendukung berdirinya negara Islam menggantikan negara Pancasila. Secara umum hasil penelitian ini membenarkan dugaan awal bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat masih mengembangkan paham keagamaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi dari penggunaan kekerasan atau yang sejalan dengan cita-cita politik kelompok fundamentalis radikal.

Daftar Pustaka

- Abdalla, Ulil Abshar. "These People Ignore the Principles of Democracy", *The Jakarta Post*. 23 September 2009.
- Adhiatera, M. "Interfaith Dialog: Agree to disagree", *The Jakarta Post*. 2 Mei 2006.
- Aguswandi. "Say No to Conservative Islam", *The Jakarta Post*. 30 August 2006.
- Al-Rasid, Harun. *Perkembangan Hukum di Indonesia Pada Era Milenium ke III ; Beberapa Butir Pemikiran*. Makalah, 2006.
- Al-Bazdawi, Abu Yusr. *Kitâb Ushûl al-Din*. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1963.
- Al-Hanbali, Abû Ya'la. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Al-Jâziry, Abdul Rahmân. *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzâhib al Arba'ah, Qismu al-'Ibadah*. Kairo: Mathba'ah Dar al-Mishriyah, 1939.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Basya, M. Hilaly. "Radicalism and Authoritarianism", *The Jakarta Post*. 30 Januari 2006.
- Boland, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Dijk, C. Van. *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, diterjemahkan *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Djiwandono, J. Soedjati. "Misinterpreted Democracy May Lead to Tyranny", *The Jakarta Post*. 6 Oktober 2006.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2003.
- McLaughlin, Kim. "Danis Prophet Cartoonist Says has no Regrets", *The Jakarta Post*. 30 Maret, 2008.
- Maftuhin, Arif. The secularization of Islamic law, dalam *The Jakarta Post*. 22 Juni 2006.
- Nurrohman. *Syari'at Islam, Konstitusi dan HAM*. Bandung: Pustaka al-Kasyaf, 2007.
- _____. "Authentic Jihad is about Peace and Coexistence", *The Jakarta Post*. 10 Februari 2007.
- Rahman, Fazlur. "Islam Challenges and Opportunities", Alford T. Welch and Pieter Cachia, (ed.), *Islam: Past Influence and Present Challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979.
- Ridâ, Muhammad Rasyîd. *Tafsir al-Manâ, Jilid IV*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- www.crisisgroup.org
- www.icipglobal.org

PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Tulisan harus merupakan hasil penelitian dalam lingkup disiplin ilmu keislaman, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word* pada kertas ukuran A.4: panjang 15-25 halaman, font *Book Antiqua*, size 11.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut;
Judul: padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
Penulis: nama, asal institusi dan alamat, serta email penulis.
Abstrak: 100-200 kata (bahasa Indonesia dan Inggris).
Kata kunci: 4-6 kata.
PENDAHULUAN: berisi latar belakang penelitian dan fokus masalah.
METODE PENELITIAN: menguraikan pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan datanya.
HASIL DAN PEMBAHASAN: terdiri dari beberapa sub sesuai kebutuhan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang runtut dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada temuan penelitian dan analisis peneliti berdasarkan perspektif teori yang digunakan.
SIMPULAN: kesimpulan atas masalah penelitian.
Daftar Pustaka: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.
5. Penulisan rujukan dilakukan dengan menggunakan *footnote*, dengan font *Book Antiqua*, size 9. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, pengutipan ulang referensi sebelumnya, penulisan sumber internet, artikel koran dan hasil wawancara;

¹Muhammad al-Zarqâni, *Syarh al-Zarqânî 'alâ Muwaththâ' al-Imâm Mâlik*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 41.

²*Ibid.*, 45.

³Jajat Burhanuddin, "The Making of Islamic Political Tradition in the Malay World", *Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2001, 40.

⁴Al-Zarqânî, *Syarh al-Zarqânî*, 71.

⁵[Http://www.ditperta.net](http://www.ditperta.net), diakses 19 Mei 2008.

⁶Masdar F. Mas'udi, "Hubungan Agama dan Negara", *Kompas*, 7 Agustus 2002.

⁷Iskandar, *Wawancara*, 25 Januari 2007.
6. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit, dan tahun, kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut;
Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu versus Waktu Lima*, alih bahasa Noor Cholis dan Hairus Salim HS. Yogyakarta: LKiS, 2000.
Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid fi Nihâyat al-Muqtashid*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

